

BAB II

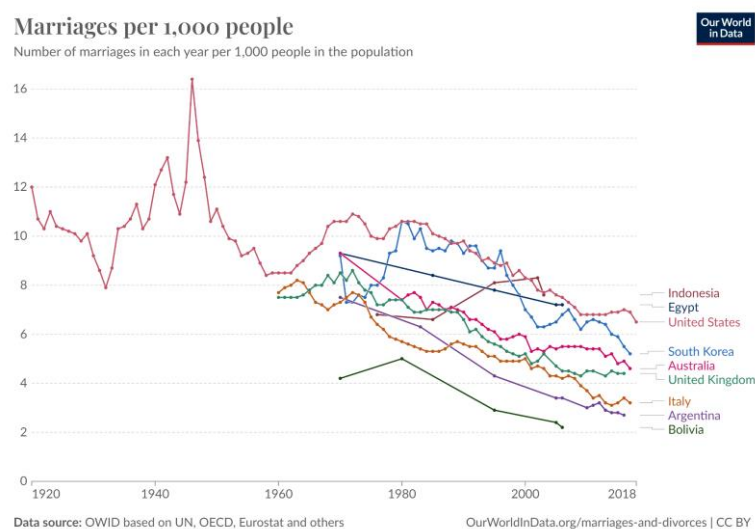
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pemaknaan terhadap perkawinan tidak lepas dari konteks hukum, agama, sosial, budaya, dan ekonomi di antara komunikator yang terlibat. Deskripsi tentang bagaimana pemaknaan perempuan dari generasi yang berbeda terhadap perkawinan diperlukan dalam penelitian untuk memahami interpretasi dari pemaknaan dengan lebih komprehensif. Bab kedua dari penelitian ini akan menyajikan gambaran yang lebih luas terkait dengan situasi perempuan antargenerasi dalam memaknai perkawinan melalui berbagai aspek.

2.1. Kondisi Perkawinan Global Saat Ini

Bukti adanya upacara perkawinan yang berasal dari milenium ketiga sebelum masehi di Mesopotamia dan Babilonia kuno menjadi fakta historis yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dalam berbagai budaya masyarakat di seluruh dunia yang sudah eksis sejak dahulu (Bertman, 2003). Hingga saat ini, perkawinan masih menjadi bagian dari kehidupan global dan memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan. Meski menyoal eksistensi perkawinan secara global, muncul fenomena baru yang variatif sehingga membuatnya memiliki ragam perbedaan dengan pola yang sudah ada pada perkawinan yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Perkembangan perkawinan sejak pertengahan abad ke-20 menunjukkan asumsi bahwa hal-hal berumur ribuan tahun hanya dapat berubah secara perlahan tidak selalu benar, khususnya dalam konteks ini. Transformasi institusi perkawinan telah terjadi dalam beberapa dekade

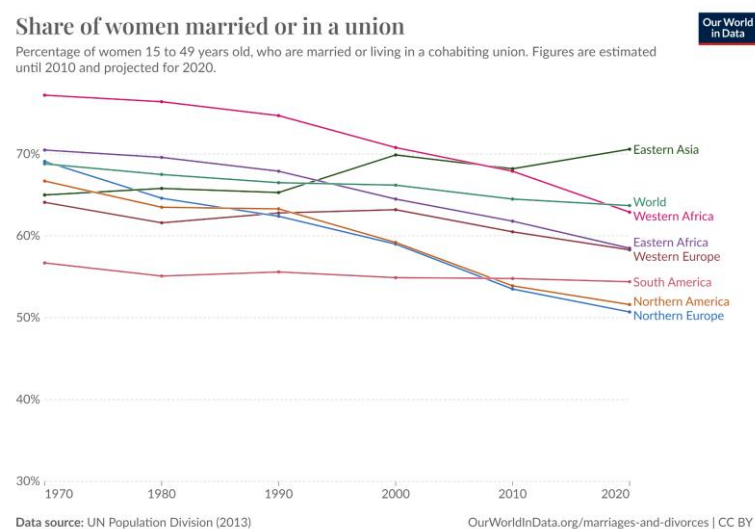
terakhir sehingga menunjukkan perbedaan mencolok dengan tradisi yang telah eksis. Pola dalam isu perkawinan saat ini memperlihatkan beberapa fenomena bahwa di banyak negara di dunia, pernikahan semakin jarang terjadi, orang-orang lebih lambat dalam menikah, semakin banyak pasangan yang tinggal bersama tanpa menikah, dan di beberapa negara terjadi pemisahan peran orang tua dengan perkawinan di mana banyak pasangan memilih memiliki dan merawat anak tanpa menikah (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024).



Gambar 2.1 Grafik angka perkawinan global (Our World in Data, 2024).

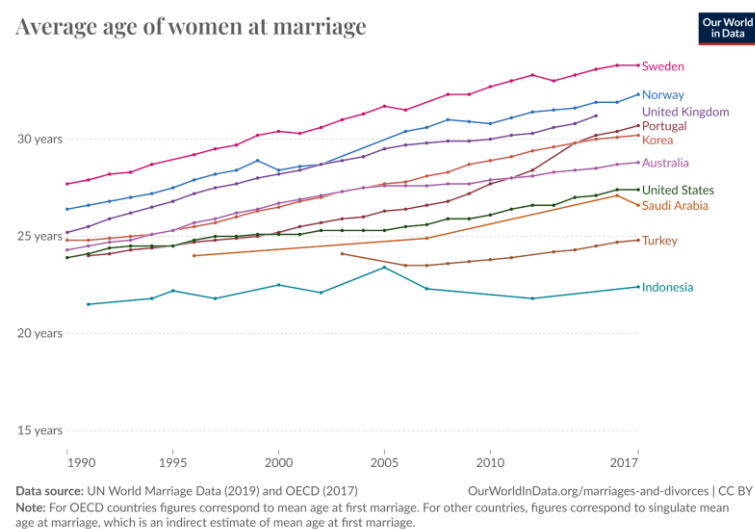
Di banyak negara di dunia, proporsi orang yang menikah mengalami penurunan. Berdasarkan data pada tahun 1920 hingga 2018 terkait angka perkawinan di hampir seluruh negara di dunia, penurunan terus terjadi (OWID, 2018). Sebagai negara dengan data angka perkawinan yang paling banyak tercatat sejak awal abad ke-20, penurunan perkawinan secara konsisten yang terjadi di Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1972 (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024). Tingkat penurunan yang terjadi berada di angka hampir 50% dan saat ini berada di titik terendah dalam sejarah, padahal angka pernikahan historis Amerika Serikat sangat

tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Di tahun 1920 pasca Perang Dunia Pertama, terjadi 12 perkawinan setiap tahunnya untuk setiap seribu penduduk yang artinya dua kali lipat lebih umum jika dikomparasikan dengan apa yang terjadi saat ini (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024). Meskipun mengalami penurunan tajam selama Depresi Besar di tahun 1930-an, angka perkawinan kembali bangkit setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di mana angkanya mencapai puncak dalam sejarah yang tercatat yakni 16,4 perkawinan per 1.000 orang setiap tahunnya (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024). Anomali terjadi sejak tahun 1970-an, di mana tidak terlihat adanya kebangkitan angka perkawinan. Tren serupa juga terjadi di negara-negara besar bahkan di benua lain seperti Inggris dan Australia yang polanya hampir sama dengan Amerika Serikat. Walaupun minim pencatatan, penurunan angka perkawinan juga terjadi di negara-negara lain seperti Amerika Latin, Afrika, dan Asia.



Gambar 2.2 Grafik perempuan yang sudah menikah atau kohabitasi (PBB, 2013).

Meski tidak terjadi dalam angka yang besar, secara global jumlah perempuan yang sudah menikah atau memiliki pasangan menunjukkan penurunan yang konsisten. Data estimasi yang dirilis oleh Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait persentase perempuan usia produktif atau di kisaran 15 hingga 49 tahun yang sudah menikah atau kohabitasi secara keseluruhan menunjukkan penurunan global dalam skala kecil yakni dari 69% di tahun 1970 menjadi 64% di tahun 2020 (Kantorová, 2013). Data dari lima dekade terakhir menunjukkan bahwa secara mayoritas, sekitar dua per tiga dari keseluruhan perempuan dengan usia tersebut yang menikah atau tinggal bersama. Namun, data tersebut menunjukkan perbedaan pola di wilayah yang berbeda. Jika jumlah perempuan yang menikah atau kohabitasi meningkat di Asia Timur, maka yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa Utara justru sebaliknya di mana terjadi penurunan persentase. Jumlah yang stabil ditemukan pada wilayah Amerika Selatan di mana jumlahnya cenderung tetap.

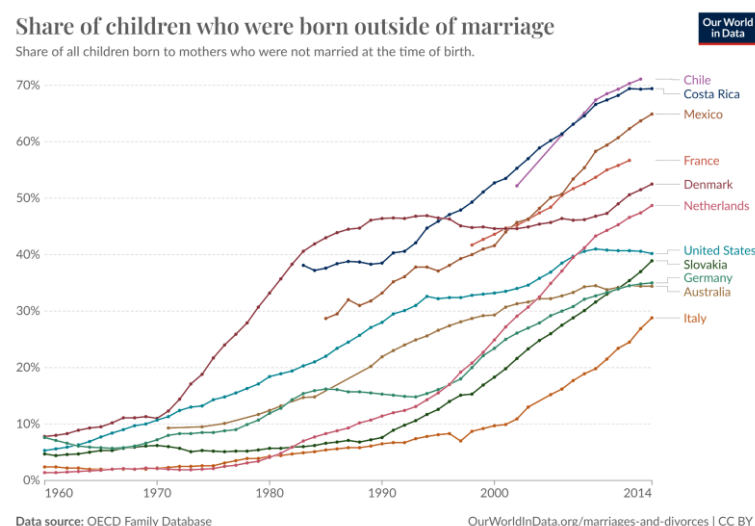


Gambar 2.3 Grafik usia perkawinan pertama perempuan (Our World in Data, 2024).

Merosotnya statistik perkawinan global juga dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata kawin pertama pada perempuan di berbagai negara terutama negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa. Sensus yang dilakukan di Inggris pada tahun 1971 menunjukkan terdapat 85% dari perempuan berusia 25 tahun yang sudah menikah, sementara di tahun 2011 angkanya merosot signifikan di kisaran 58% saja (OWID, 2024). Secara mayoritas, sejak tiga hingga empat dekade terakhir perempuan semakin terlambat menikah di mana usia perkawinan pertama mereka meningkat antara tiga hingga enam tahun lebih lambat. Komparasi yang paling terlihat terkait peningkatan usia menikah terjadi di Swedia, Norwegia, dan Inggris di mana pada tahun 1990 usia perempuan ketika pertama kali menikah berada di angka 25 hingga 27, di tahun 2017 mayoritas perempuan menikah di usia 30 hingga 33 tahun.

Data yang menunjukkan semakin banyak orang yang menikah terlambat tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa semakin banyak pula generasi muda yang belum menikah. Survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2019 menganalisis bahwa salah satu faktor individu baik yang sudah memiliki pasangan atau belum memutuskan untuk menunda perkawinan adalah karena mereka merasa belum memiliki kesiapan finansial (Horowitz *et al.*, 2022). Ada kekhawatiran pada diri mereka bahwa kehidupan perkawinan tidak terjamin dengan baik berkat stabilitas individu maupun pasangan yang belum tercapai serta tidak adanya pandangan karier yang jelas di masa depan. Penundaan perkawinan ini juga berkaitan dengan keraguan individu bahwa ia sudah menemukan pasangan yang tepat dan tidak siap untuk membuat komitmen yang serius berupa perkawinan

(Horowitz *et al.*, 2022). Pergeseran nilai dan norma di mana mayoritas masyarakat di Amerika Serikat tidak lagi menganggap perkawinan sebagai keharusan agar memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia, membuat individu memilih hidup bersama tanpa menikah atau tidak hidup berpasangan sama sekali. Angka kohabitasi di Amerika Serikat juga meningkat dari tahun 1990 yang hanya 3% menjadi 7% di tahun 2022 (Horowitz *et al.*, 2022). Meski jumlah pasangan kohabitasi masih lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan menikah, tren peningkatannya cukup signifikan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.4 Grafik anak di luar perkawinan (OECD Family Database, 2020).

Nilai baru yang berkembang bahwa perkawinan tidak lagi memiliki urgensi signifikan dalam kehidupan manusia membawa pada tren lain di mana terjadi pemisahan antara perkawinan dan peran sebagai orang tua. Kesepakatan pasangan untuk menjalin kohabitasi berkaitan pula pada komitmen mereka untuk memiliki

anak dan menjadi orang tua meski tidak menikah. Khususnya di hampir semua negara OECD, jumlah anak yang lahir di luar perkawinan meningkat secara substansial dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatannya tercatat di kisaran angka 20% pada tahun 2014, sedangkan di tahun 1970-an eksistensi orang tua di luar perkawinan hanya berada di kisaran angka 10% saja (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024). Individu menyadari bahwa tidak ada relevansi antara menikah dan menjadi orang tua, sebab tanpa menikah pun mereka bisa memiliki anak dan memberikan pengurusan yang layak terhadapnya. Nilai yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir di negara-negara besar ini adalah bahwa perkawinan bukan lagi wadah untuk menghadirkan keturunan karena setiap pasangan memiliki keluasan untuk menjadi orang tua meski tanpa adanya status perkawinan yang mengikat keduanya. Di Meksiko dan Kosta Rika yang merupakan negara kaya, jumlah kehadiran anak di luar perkawinan bahkan ada di angka 64,9% di Meksiko dan 69,4% di Kosta Rika (OECD, 2020).

Tren lain yang cukup menonjol dalam isu perkawinan global adalah normalisasi perkawinan sesama jenis di banyak negara. Akomodasi terhadap perkawinan sesama jenis dipandang sebagai bentuk kesetaraan perkawinan yang merupakan hak asasi manusia dan hak sipil serta memiliki implikasi politik, sosial, dan agama yang penting di setiap negara. Dimulai dari Denmark pada tahun 1989 yang pertama kali mengakui hubungan perkawinan sesama jenis, negara lain menyusul untuk menerima dan melegalkan jenis hubungan tersebut meski membutuhkan waktu lebih dari satu dekade dan Belanda menjadi negara yang melegalisasi perkawinan homoseksual (Ortiz-Ospina dan Roser, 2024). Perubahan

sikap masyarakat global terhadap homoseksualitas diprediksi menjadi faktor kunci terjadinya transformasi hukum untuk melegalkan perkawinan sesama jenis.

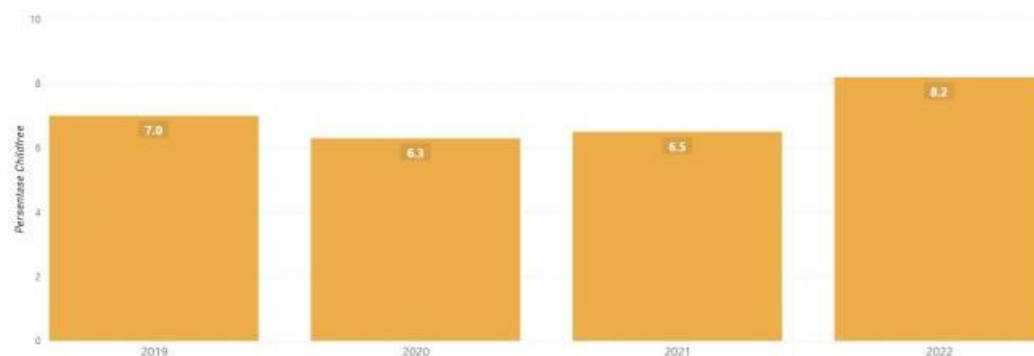
2.2. Situasi Perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia semakin didominasi oleh mode global yang sudah banyak berkembang di berbagai negara, salah satunya dalam hal penundaan perkawinan di kalangan generasi muda terutama dengan latar belakang demografis hidup di kota-kota besar. Pemuda yang dikategorikan oleh UU Kepemudaan berada di rentang usia 16 hingga 30 tahun, berperan besar pada merosotnya jumlah perkawinan di Indonesia di mana 68,29 persen dari mereka belum menikah berdasarkan data tahun 2023 (BPS, 2023). Pada survei yang dilakukan oleh BPS (2020), ditemukan bahwa usia perkawinan pertama bagi perempuan di Indonesia semakin meningkat dalam sepuluh dekade terakhir dari rerata 21 tahun pada 2010 menjadi sekitar 23 tahun di tahun 2020. Pergeseran aspek sosial ekonomi dalam masyarakat menyokong perkembangan fenomena penundaan perkawinan, di mana disinyalir angkanya berbanding lurus dengan peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto). Indeks PDB pada tahun 2013 dan 2014 yang diindikasikan sebagai tahun dengan angka perkawinan cukup tinggi justru berada di angka rendah yakni 0,9 hingga 0,8 triliun US dolar, sedangkan dengan angka perkawinan yang merosot, PDB tahun 2023 menduduki level tertinggi di angka 1,34 triliun US dolar (Pierre, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang bergerak ke angka positif menghadirkan kesempatan akses fasilitas yang terbuka lebar seperti pendidikan dan pekerjaan, sehingga keinginan untuk mengembangkan karier pada kaum muda menjadi lebih besar dibandingkan dengan kecenderungan untuk menyegerakan perkawinan

(Widyarti dalam Hussin, 2024). Pada survei bertajuk *Indonesian Gen-Z and Millennial Marriage Planning and Wedding Preparation* oleh Populix menunjukkan bahwa berkat kesempatan aktualisasi diri yang terbuka lebar ini, pada generasi Z dan milenial yang belum memiliki rencana menikah, sekitar 57% responden memilih memfokuskan diri pada karier dan 53% dari mereka ingin menikmati kehidupan pribadi terlebih dahulu di luar pekerjaan seperti hobi dan keluarga (Populix, 2023).

Di samping itu, meningkatnya tren ekonomi baru seperti *gig economy* yang berisiko meminimalkan kesempatan individu untuk mendapatkan stabilisasi pekerjaan berkat sistem kontrak singkat, membuat generasi muda kesulitan mewujudkan cita-citanya untuk bisa stabil secara finansial sebelum memasuki kehidupan perkawinan (Sutopo dalam Nugroho, 2024). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan papan, generasi muda saat ini mengaku kesulitan untuk membeli rumah di mana 47,2 persen dari keseluruhan 1.192 responden survei UniTrend berpendapatan di kisaran 2 hingga 5 juta rupiah, tidak sebanding dengan harga rumah yang meningkat signifikan (UniTrend, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh tingginya tekanan ekonomi dan ketidakpastian pasar tenaga kerja meningkatkan tekanan finansial bagi individu untuk memutuskan memasuki jenjang perkawinan. Badan Pusat Statistik secara umum mengungkapkan bahwa tren melajang merupakan bagian dari akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta budaya yang meningkatkan kecenderungan perbaikan kualitas hidup individu (Maruf, 2023).

Khususnya pada perempuan, level pendidikan yang meningkat dinyatakan oleh Kepala BKKBN menjadi pendorong utama mundurnya median usia menikah (Prameswari, 2024). Perempuan berkesempatan untuk mengembangkan perspektifnya terkait perkawinan dan melepaskan diri pada budaya patriarki dengan seperangkat tuntutan kepada perempuan untuk tunduk pada nilai perkawinan yang sudah lama berkembang. Faktor kemajuan pemberdayaan perempuan menjadikan prioritas hidup golongan ini adalah untuk mengaktualisasikan diri melalui pekerjaan maupun pendidikan dan meletakkan perkawinan di urutan setelahnya. Perempuan membangun otonomi dengan hidup sendiri dan mandiri karena tidak leluasa mengelola waktu dan keuangannya jika terikat dalam perkawinan sehingga menciptakan perasaan tidak nyaman (Drajat dalam Pandu, 2024).



Sumber: diolah dari SUSENAS

Gambar 2 Persentase Perempuan* Childfree 2019-2022

* perempuan usia produktif yang pernah kawin namun belum pernah memiliki anak serta tidak menggunakan alat KB)

Gambar 2.5 Grafik jumlah perempuan menikah tanpa anak (SUSENAS, 2023).

Meski eksistensinya belum umum, terdapat peningkatan minat terhadap model perkawinan antinatalisme dengan ragam alasan yang melatarbelakanginya. Sejak tahun 1971, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan adanya penurunan angka kesuburan total (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan selama masa reproduksinya yakni di usia 15-49 tahun yang konstan, di mana populasi perempuan tanpa anak mencapai angka kurang lebih 8,2% atau setara dengan 71.000 jiwa (BPS, 2023). Namun, fenomena antinatalitas atau *childfree* merupakan hal yang cukup baru di Indonesia. Peningkatan terkait fenomena ini terlihat signifikan pada tahun 2019 hingga 2022, yang mana hingga tahun 2022 jumlahnya setara dengan 0,1% dari total perempuan usia produktif di Indonesia. Meski prevalensinya sempat mengalami penurunan di awal pandemi Covid-19 yakni di tahun 2020, tren ini kembali menunjukkan peningkatan di tahun-tahun berikutnya (BPS, 2023). Pada tahun 2022, 8 dari 100 orang perempuan di usia produktif yang menikah atau sudah pernah menikah memilih untuk tidak memiliki anak dengan memfungsikan alat KB. Namun, pertumbuhan angka *childfree* ini belum diikuti oleh penerimaan masyarakat terkait nilai baru yang tidak umum dalam budaya Indonesia. Masyarakat menganggap perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai sebuah masalah, karena menurut Ruegamer dan Dziengel (2021) kemampuan melahirkan keturunan memosisikan perempuan pada status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki maupun perempuan lain yang tidak memiliki kemampuan serupa. Sedangkan individu yang menyetujui tren ini melandaskan argumennya pada eksistensi anak yang bisa menjadi beban ekonomi bagi keluarga. Pesimisme terkait

ketidakmampuan membiayai dan mengurus anak dengan baik membuat individu memilih untuk menerapkan prinsip antinatalisme dalam hidup mereka (BPS, 2023).